



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Juni 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NINIK DARMINI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)
3. NHK : 1014741

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.683.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 379 m2/96 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 379.000.000
4. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 572 m2/100 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 750.000.000
8. Tanah Seluas 950 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 40.000.000
9. Tanah Seluas 1.670 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 79.000.000



10. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 535.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 220.000.000

1. MOBIL, SUZUKI XL 7 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 130.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 662.224.413

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.695.224.413

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.695.224.413

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.